

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH

Munawarah<sup>1\*)</sup> dan Irne Aryanie<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen Akuntansi FEB Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)

\*) email: monawarah35@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.55178/idm.v.3i5.235>

### ABSTRACT

#### Article history

Received:

March 18, 2022

Revised:

March 20, 2022

Accepted:

March 24, 2022

Page:

65 – 73

#### Kata Kunci:

Capital Expenditures,  
General Allocation Funds,  
Special Allocation Funds,  
Economic Growth

*This research aims to analyze the factors that influence financial performance in Aceh Province. The data used in this study was sourced from the APBD budget realization report in 23 regency/cities in Aceh Province with period of 2010-2017, so that it has a balance panel data with a total of 184 observations. This research used static panel data by used the assumption is multiple regression analysis. The results of this research indicate that capital expenditure has positive and significant effect on financial performance, general allocation fund have positive and significant effect on financial performance, special allocation fund have negative and significant effect on financial performance, economic growth has no effect significant and negative on financial performance. And special autonomy fund has negative and significant effect on the financial performance of local government regency/cities in Aceh Province. The government should prioritize capital expenditure budget for the public interest, so that a more independent region is created.*

### Pendahuluan (Introduction)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Akibat dari adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah pada era otonomi daerah yang belum baik menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Kinerja bahkan cenderung menurun di era otonomi dibanding sebelum adanya otonomi daerah (Hariyadi 2002; Azhar 2008). Permasalahan *governance* pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus korupsi dan upaya-upaya untuk mereformasi birokrasi, dan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan masyarakat karena tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu daerah agar dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya telah sesuai atau tidak dengan aturan-aturan yang berlaku (Mulyadi, 2007). Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Pengelolaan keuangan pemerintah Aceh selama ini diduga bermasalah dan terjadi pelanggaran hukum, dimana pengelolaannya tidak tepat sasaran. Sampai saat ini masih terdapat beberapa masalah strategis di Aceh yang harus dikelola dengan baik, sehingga tidak memunculkan efek negatif. Salah satu permasalahan di Aceh yang mendapat perhatian publik ialah masalah pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh yang dinilai banyak merugikan keuangan negara. Selain itu, hasil telaah yang dilakukan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun 2017, DPRA menilai laporan tersebut tidak

mencerminkan kondisi yang riil, informatif serta juga tidak mempunyai data pembandingan, sehingga sulit untuk dinilai capaian kemajuan kinerja pemerintah Aceh (Aceh Journal National Network, 25 Mei 2018).

Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD yang telah disahkan (Halim, 2008). Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial.

Penelitian sebelumnya telah menguji beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya adalah faktor belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (Mulyani dan Wibowo, 2017; Andirfa dkk, 2016; Leki dkk, 2018), faktor dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (Machmud dan Irwan, 2018 dan Abdullah dkk, 2015), faktor dana perimbangan (Indiani, 2014; Julitawati dkk, 2014; dan Ardi dkk, 2016) faktor pertumbuhan ekonomi (Andriany dan Yani 2017) dan keberagaman faktor lain seperti leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, dan pajak daerah (Sesotyaningtyas, 2012). Hasil penelitian tersebut ditemukan masih inkonsisten atau belum lengkap, dan masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dengan memperhitungkan Dana Otonomi Khusus. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Keuangan masih sangat terbatas dan belum ditemukan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh belanja modal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pertumbuhan ekonomi dan dana otonomi khusus Aceh sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Otonomi Khusus Aceh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Aceh.

## **Tinjauan Literatur (*Literature Review*)**

### **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*. Halim (2008) menyatakan belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dimana investasi dapat diartikan bermacam-macam tergantung jaringan dan aset tetap lainnya.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan antar daerah, khususnya karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Saragih (2003) berpendapat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan utama Dana Alokasi Umum disamping untuk mendukung penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Ikhlash, 2011). DAK mencerminkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Proses perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan atau pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi dari pada yang dicapai pada waktu sebelumnya. (Murni, 2006) Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat.

### **Dana Otonomi Khusus**

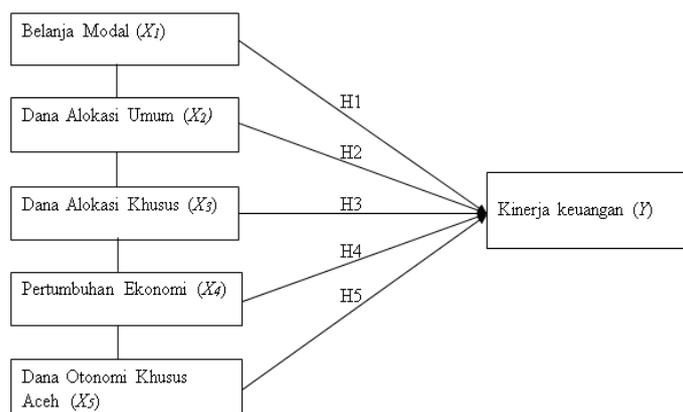
Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

## Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan (Guritno dan Waridin, 2005). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, dengan diketahuinya perbedaan tersebut maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan.

### Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil literasi yang dijelaskan diatas, maka dapat di Gambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis yang diajukan dan dikembangkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.  $H_1$  : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
2.  $H_2$  : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
3.  $H_3$  : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
4.  $H_4$  : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
5.  $H_5$  : Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

### Metode Penelitian (Methodology)

Lokasi pada penelitian ini dilakukan pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah Aceh yang diperoleh dengan mengakses website BPS dan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan (DJPk). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa data panel (*pooled data*) merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Laporan Keuangan pemerintah Aceh dengan 8 tahun (2010-2017) periode pengamatan, sehingga banyaknya observasi dalam penelitian ini adalah 184 observasi.

Penelitian ini secara umum menggunakan 1 variable terikat dan 5 variabel bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan, dimana pada penelitian ini variabel kinerja keuangan Pemerintah dijadikan sebagai laten variabel yang dikonstruks dengan menggunakan 4 indikator, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Derajat Desentralisasi, rasio Ketergantungan daerah dan rasio Efektivitas dengan perhitungan menggunakan metode Analisis faktor (*Factor Analysis*). Sementara itu, variable bebas dalam penelitian ini terdiri dari Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Otonomi Khusus.

Pada penelitian ini data diolah dengan *Microsoft Excel dan Eviews 10*. Adapun persamaan statistik yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KK = \alpha + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 PE_{it} + \beta_5 DOK_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots$$

## Hasil dan Pembahasan (*Results and Discussion*)

### Analisis Deskriptif Statistik

Pada analisis statistik deskriptif, akan terlihat bagaimana nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Deskriptif Statistik (Dalam Milyar Rupiah Kecuali KK)

	KK	BM	DAU	DAK	PE	DOKA
Mean	4,040017	190,013	452,185	94,621	4.811.559	108.711
Median	-0,250185	145,85	425,306	55,357	3.486.156	70.380
Maximum	4,501231	512,06	843,915	382,808	18.151.766	642.814
Minimum	-1,330222	47,051	163,055	16,841	745,858	450.000
Std. Dev.	0,993968	112,29	156,311	81,088	3.867.750	115.711

Sumber : Hasil Analisis Data, 2019

Ket: KK adalah kinerja keuangan, BM adalah belanja modal, DAU adalah dana aloaksi umum, DAK adalah dana alokasi khusus, DOKA adalah dana otonomi khusus Aceh.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat KK pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki nilai mean sebesar 4,0400 dan nilai standar deviasi lebih kecil yaitu sebesar 0,9939 yang mengindikasikan bahwa nilai KK secara keseluruhan sudah berdistribusi dengan baik dan sebarannya sudah merata. Adapun nilai maksimum dan minimum dari 184 observasi yaitu sebesar 4,5012 dan -1,3302.

Variabel BM pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki nilai mean sebesar 190,013 Milyar dan nilai standar deviasi lebih kecil yaitu sebesar 112,29 Milyar yang mengindikasikan bahwa nilai BM secara keseluruhan sudah berdistribusi dengan baik dan sebarannya sudah merata. Adapun nilai maksimum dan minimum dari 184 observasi yaitu sebesar 512,06 Milyar dan 47,051 Milyar.

Variabel dana alokasi umum (DAU) 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki nilai mean sebesar 452,185 Milyar dan nilai standar deviasi lebih kecil yaitu sebesar 156,311 Milyar yang mengindikasikan bahwa nilai DAU secara keseluruhan sudah berdistribusi dengan baik dan sebarannya sudah merata. Adapun nilai maksimum dan minimum dari 184 observasi yaitu sebesar 843,915 Milyar dan 163,055 Milyar.

Variabel DAK pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki nilai mean sebesar 94,621 Milyar dan nilai standar deviasi lebih kecil yaitu sebesar 81,088 Milyar yang mengindikasikan bahwa nilai DAK secara keseluruhan sudah berdistribusi dengan baik dan sebarannya sudah merata. Adapun nilai maksimum dan minimum dari 184 observasi yaitu sebesar 382,808 Milyar dan 16,841 Milyar.

Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki nilai mean sebesar 4,811,559 Milyar dan nilai standar deviasi lebih kecil yaitu sebesar 3,867,750 Milyar yang mengindikasikan bahwa nilai PE secara keseluruhan sudah berdistribusi dengan baik dan sebarannya sudah merata. Adapun nilai maksimum dan minimum dari 184 observasi yaitu sebesar 18,151,766 Milyar dan 745,858 Milyar.

Variabel DOKA pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki nilai mean sebesar 108,711 Milyar dan nilai standar deviasi lebih kecil yaitu sebesar 70,380 Milyar yang mengindikasikan bahwa nilai DOKA secara keseluruhan sudah berdistribusi dengan baik dan sebarannya sudah merata. Adapun nilai maksimum dan minimum dari 184 observasi yaitu sebesar 642,814 Milyar dan 450,000 Milyar.

### Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan salah satu tehnik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) (Gujarati dan Porter, 2009). Matriks berikut menjelaskan signifikansi dan arah korelasi antara variabel secara keseluruhan. Adapun hasil matriks korelasi sebagai berikut:

Tabel 2. Korelasi Antar variabel

Variabel	KK	BM	DAU	DAK	PDRB
BM	+				
DAU	+	+			
DAK	+	+	+		
PDRB	+	+	+	+/insign	
DOKA	+	+	+	+	+

Sumber : Hasil Analisis Data, 2019

Ket: tingkat level signifikansi + adalah signifikan positif, ins adalah tidak signifikan, kk adalah kinerja keuangan, BM adalah belanja modal, DAU adalah dana alokasi umum, Dak adalah dana alokasi khusus, PE adalah pertumbuhan ekonomi dan DOKA adalah dana otonomi khusus aceh.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan korelasi antar variable secara keseluruhan antar kabupaten/kota di provinsi aceh. Tabel korelasi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variable (KK, BM, DAU, DAK, PE dan DOKA) memiliki nilai hubungan yang positif dan signifikan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sementara itu hanya variabel pertumbuhan ekonomi dan DAK yang memiliki hubungan positif namun tidak signifikan.

### Teknik Pemilihan Model

Agar model yang digunakan baik dan sesuai, maka diperlukan penaksiran model. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu *Pooling Least Square*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* (Widarjono, 2007). Untuk menentukan model terbaik yang sesuai dengan penelitian ini, maka akan dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk membandingkan model CEM dan FEM, sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan FEM dan REM.

Tabel 3. Uji Chow (F-Statistik)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.076348	-22,131	0.0061
Cross-section Chi-square	48.161688	22	0.001

Sumber : Hasil Analisis Data, 2019

Berdasarkan Tabel 3 hasil *redundant fixed effect* atau *like lihood ratio* untuk model ini memiliki nilai probabilitas  $0,001 < \alpha (0,05)$ , sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, model yang sesuai dari hasil ini yaitu *fixed effect model*. Dengan demikian, maka model yang pilih adalah *fixed effect model*. Berdasarkan hasil ini model bisa dilanjutkan ke *Random Effect Model*.

Tabel 4. Uji Hausman (T-Statistik)

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.599989	5	0.0006

Sumber : Hasil Analisis Data, 2019

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai Prob (*p-value*) adalah sebesar  $0,0006 < \alpha (0,05)$  atau 5 %), maka menolak hipotesis nol dan menerima  $H_1$ , sehingga dapat disimpulkan model yang terpilih adalah *Fixed effect model*.

### Hasil Analisis Faktor Dari Pada Variabel Laten Kinerja keuangan

Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama. Digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Hasil analisis faktor dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Faktor Dari Pada Variabel Laten Kinerja keuangan

	Loadings KK	Factor	Variance
RKKD	0.987608	KK	2.674675
RKD	-0.766542	Total	2.674675
RE	0.424416		MSA
DD	0.965189	Kaiser's MSA	0.54024
Eigenvalues: (Sum = 4, Average = 1)			
Number		Value	Proportion
1		2.822918	0.7057

Sumber : Hasil Analisis data, 2019

Berdasarkan Tabel 5 dijelaskan bahwa Rasio RKKD memiliki nilai loading faktor sebesar 0,9876, RKD memiliki nilai loading faktor sebesar -0,7665 atau, selanjutnya RE memiliki nilai loading faktor sebesar 0,4244 dan DD memiliki nilai loading faktor sebesar 0,9651. Adapun total varian dari KK sebagai laten variabel adalah 2,6746, artinya RKKD, RKD, RE dan DD secara serentak mampu menggambarkan kontruk KK sebesar 2,6746. Oleh karena itu, kontruk KK sebagai laten variabel digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini.

Selanjutnya pada Tabel 5 dapat di lihat bahwa eigenvalue 2,822918 dengan propotion 0,7057 artinya faktor KK dapat menjelaskan 70,57% variasi total ke empat variabel yang dipakai untuk membentuk faktornya. Kemudian dapat di lihat bahwa dari Kaiser's Meyer 0,54024 > 0,5. Sehingga yang berarti hasil faktor analisis dalam penelitian ini dapat diterima.

## Pembahasan

### Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh sudah sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.

Semakin meningkatnya alokasi belanja modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pengalokasian belanja modal yang baik dan tepat sasaran dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin baik dan tepat. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Sugiono (2014) yang menemukan ada pengaruh positif signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mulia (2016) belanja modal yang difokuskan kepada pembangunan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.

### Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya semakin tinggi dana alokasi umum maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sudah menggunakan DAU untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menemukan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Anwar et al., 2016; Julitawati, 2012; Rukmana, 2013).

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya semakin tinggi dana alokasi khusus maka semakin menurun pula kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus (DAK) bukan berasal dari kreativitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah. Sehingga dana alokasi khusus selalu ditentukan berdasarkan perbandingan antar bobot urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Alasan lainnya adalah DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulia (2016) menyatakan bahwa DAK yang merupakan bagian dari dana perimbangan memiliki pengaruh yang negatif, artinya semakin besar DAK yang diberikan menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bernilai negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin menurun pula kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mendongkrak kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, karena pemerintah kabupaten/kota belum mampu menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing sehingga daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh salah satunya karena terbatasnya anggaran yang tersedia, ini karena hampir pada semua sektor perekonomian di Aceh masih tergantung kepada anggaran pemerintah atau investasi pemerintah. Hal ini disebabkan minimnya realisasi investasi asing di Aceh. Selain itu juga karena modal investasi dari swasta cukup minim atau boleh dikatakan tidak ada. Selanjutnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh sebagai lokomotif penggerak ekonomi daerah juga hampir tidak terlihat, semestinya BUMD ini bisa diandalkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dengan mengoptimalkan pendayagunaan potensi unggulan daerah, layaknya seperti BUMN dan beberapa kawasan yang mempunyai potensi unggulan tertentu dapat diarahkan pengelolaannya oleh BUMD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Majriyati (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, realisasi pendapatan asli daerah, realisasi belanja modal, dan perubahan anggaran pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau pun secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya semakin tinggi dana otonomi khusus maka semakin menurun pula kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Fenomena ini disebabkan karena penggunaan dana otonomi khusus yang belum tepat sasaran. Meski dana otonomi khusus Aceh yang cenderung terus meningkat, namun kurang berpengaruh terhadap indikator pencapaian pembangunan kabupaten/kota di Aceh. Hal ini disebabkan karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan enam bidang pembangunan yakni infrastruktur, ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan. Selain itu dana otsus itu juga dicincang-cincang kecil ke berbagai proyek sehingga hasilnya tidak efektif. Dana tersebut masih dipakai untuk membiayai pengadaan hal-hal yang kurang bermanfaat dan berkelanjutan, seperti pembelian mebel, mobil dinas, hingga pengadaan kulkas sehingga tidak ada efek yang berarti untuk masyarakat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Ade Rosita (2018) bahwa dana otsus berpengaruh positif terhadap PDRB. Hasil penelitian yang sama juga yang dilakukan oleh Malkaniar (2017) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dana transfer otonomi khusus

Pemerintah Aceh telah terwujud dengan baik. Hasil penelitian juga mendapatkan bahwa usulan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus harus memiliki dampak signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memiliki daya ungkit yang berdampak secara jangka panjang bagi pembangunan Aceh.

## Simpulan dan Saran (*Conclusion and Suggestion*)

### Simpulan (*Conclusion*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
4. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
5. Dana Otonomi Khusus Aceh berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

### Saran (*Suggestion*)

Dalam rangka mengatasi meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Aceh, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh lebih memprioritaskan anggaran belanja modal untuk kepentingan publik agar infrastruktur yang dibangun lebih baik sehingga memudahkan masyarakat mengakses daerah-daerah yang terpencil dalam rangka meningkatkan potensi daerah, sehingga daerah lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Penulis menyarankan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi hendaknya dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat melalui dana transfer untuk mewujudkan kemandirian daerah.
3. Penulis menyarankan hendaknya dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk keistimewaan Provinsi Aceh dapat dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam rangka mereduksi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Pemerintah Aceh perlu merencanakan penggunaan anggaran yang lebih baik, agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- 1) Abdullah & Febriansyah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan*. Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu. Vol.3, No. 1, Oktober 201
- 2) Abdul, Halim. 2008. *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- 3) Andirfa, dkk. 2018. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 5, No. 3
- 4) Andriany dan Yani. 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Vol. 8 No.1
- 5) Asfia, Murni. 2006. *Ekonomika Makro*, Jakarta, PT. Refika Aditama.
- 6) Gujarati dan Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat, Jakarta.
- 7) Ikhlas, Saily. 2011. *Dana Alokasi Khusus dalam pembiayaan pembangunan*.
- 8) Julitawati, Ebit., Darwanis, & Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi, Volume 1, No 1. Agustus Tahun 2012.
- 9) Leki, dkk. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 18 No. 05.
- 10) Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba. Empat. Jakarta.

- 11) Mulyani, Sri dan Wibowo, Hardianto. 2017. *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kompartemen, Vol. Xv No.1.
- 12) Rukmana, Wan Vidi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*. hal. 1-15.
- 13) Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- 14) Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. *Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Accounting Analysis Journal, Volume 1, No.1 Tahun 2012.
- 15) Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.